



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN
POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA,
SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 JULI 2012**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN
POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA,
SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penetapan surat keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode Pengenal Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empatbelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012.

Pasal 1

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/P/ASABRI.../A/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../A/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - d. huruf KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero);

- f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
- g. huruf A di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 2

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/P/ASABRI.../B/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../B/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - d. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - g. huruf B di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 3

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak:
 - a. 000000/KEP/P/ASABRI.../C/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../C/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;

- c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
- d. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
- e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero)
- f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
- g. huruf C di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan
- h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 4

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/PK/P/00000/A/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/A/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
 - g. huruf A di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 5

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/PK/P/00000/B/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/B/00 untuk Kantor Regional BKN.

- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
 - g. huruf B di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 6

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak adalah:
- a. 000000/KEP/PK/P/00000/C/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/C/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
 - g. huruf C di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 7

Daftar Kode Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Daftar Kode Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Kode Instansi Pusat dan Kode Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 744

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN
 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN
 ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI
 ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 18 TAHUN 2012

KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN
 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO. URUT	JENIS SURAT KEPUTUSAN	KEWENANGAN	KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4
1.	SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/P/ASABRI.../A/00 000000/KEP/KR.../KC.../A/00
2.	SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/P/ASABRI.../B/00 000000/KEP/KR.../KC.../B/00
3.	SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/P/ASABRI.../C/00 000000/KEP/KR.../KC.../C/00
4.	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/PK/P/00000/A/00 000000/KEP/PK/KR.../00000/A/00
5.	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/PK/P/00000/B/00 000000/KEP/PK/KR.../00000/B/00
6.	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/PK/P/00000/C/00 000000/KEP/PK/KR.../00000/C/00

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

 EKO SUTRISNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN
 PENYESUAIAN PENSUN POKOK PENSUNAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSUN
 ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI
 ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 18 TAHUN 2012

DAFTAR KODE KANTOR REGIONAL BKN

NO.	NAMA KANTOR REGIONAL	NOMOR KODE
1	2	3
1.	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	I
2.	Kantor Regional II BKN Surabaya	II
3.	Kantor Regional III BKN Bandung	III
4.	Kantor Regional IV BKN Makassar	IV
5.	Kantor Regional V BKN Jakarta	V
6.	Kantor Regional VI BKN Medan	VI
7.	Kantor Regional VII BKN Palembang	VII
8.	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	VIII
9.	Kantor Regional IX BKN Jayapura	IX
10.	Kantor Regional X BKN Denpasar	X
11.	Kantor Regional XI BKN Manado	XI
12.	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	XII

KEPALA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN
 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN
 ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI
 ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 18 TAHUN 2012

DAFTAR KODE KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG
 WILAYAH PEMBAYARAN PT. TASPEN (Persero)/ PT. ASABRI (Persero)

NO.	NAMA KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG	NOMOR KODE	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. PT. TASPEN (Persero)		
1.	KCU Jakarta	100	
2.	Bandar Lampung	101	
3.	Bengkulu	102	
4.	Palembang	103	
5.	Palangka Raya	104	
6.	Pontianak	105	
7.	Pangkal Pinang	106	
8.	KCU Medan	200	
9.	Banda Aceh	201	
10.	Pematang Siantar	202	
11.	Bukittinggi	203	
12.	Padang	204	
13.	Pekanbaru	205	
14.	Jambi	206	
15.	Tanjung Pinang	207	
16.	KCU Bandung	300	
17.	Bogor	301	
18.	Tasikmalaya	302	
19.	Cirebon	303	
20.	Serang	304	
21.	KCU Semarang	400	
22.	Purwokerto	401	
23.	Surakarta	402	
24.	Yogyakarta	403	
25.	Pekalongan	404	
26.	KCU Surabaya	500	
27.	Malang	501	
28.	Madiun	502	
29.	Kediri	503	
30.	Banjarmasin	504	
31.	Samarinda	505	
32.	KCU Makassar	600	
33.	Manado	601	

NO.	NAMA KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG	NOMOR KODE	KETERANGAN
1	2	3	4
34.	Palu	602	
35.	Kendari	603	
36.	Ambon	604	
37.	Jayapura	605	
38.	Gorontalo	606	
39.	Ternate	607	
40.	Mamuju	608	
41.	Manokwari	609	
42.	KCU Denpasar	700	
43.	Kupang	701	
44.	Mataram	702	
45.	Jember	703	
	B. PT. ASABRI (Persero)		
46.	KC Medan	801	
47.	KC Palembang	802	
48.	KC Bandung	803	
49.	KC Semarang	804	
50.	KC Surabaya	805	
51.	KC Balikpapan	806	
52.	KC Makassar	807	
53.	KC Jayapura	808	
54.	KC Denpasar	809	
55.	KC Jakarta	810	
56.	KC Ambon	811	
57.	KC Banda Aceh	812	

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



[Handwritten Signature]
EKO SUTRISNO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN
 PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN
 ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI
 ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 18 TAHUN 2012

KODE INSTANSI PUSAT

NO	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	11001
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	11002
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	11003
4	Kementerian Riset dan Teknologi	12002
5	Kementerian Koperasi dan UKM	12003
6	Kementerian Lingkungan Hidup	12004
7	Kementerian BUMN	12005
8	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12006
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	12007
10	Kementerian Pemuda Olahraga	12009
11	Kementerian Perumahan Rakyat	12010
12	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	12011
13	Kementerian Dalam Negeri	13001
14	Kementerian Luar Negeri	13002
15	Kementerian Pertahanan	13003
16	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	13004
17	Kementerian Keuangan	13005
18	Kementerian Pertanian	13009
19	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	13006
20	Kementerian Perhubungan	13011
21	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	13016
22	Kementerian Kesehatan	13015
23	Kementerian Agama	13018
24	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13013
25	Kementerian Sosial	13017
26	Kementerian Kehutanan	13010
27	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	13012
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	13020
29	Kementerian Perdagangan	13008

NO	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
30	Kementerian Perindustrian	13007
31	Kementerian Pekerjaan Umum	13014
32	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13100
33	Kementerian Sekretariat Negara	12001
34	Kementerian PPN/Bappenas	12008
35	Sekretariat Kabinet	14101
36	Sekretariat Presiden	14407
37	Sekretariat Wakil Presiden	14408
38	Sekretariat Militer	14409
39	Setjen MPR	14001
40	Setjen DPR	14002
41	Setjen Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS)	16003
42	Setjen Komisi Pemilihan Umum	16004
43	Setjen KOMNAS HAM	16005
44	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	14402
45	Setjen Komisi Yudisial	14007
46	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	14003
47	Kejaksaan Agung	16001
48	Mahkamah Agung RI	14004
49	Kepolisian Negara	16002
50	Markas Besar (MABES) TNI	14103
51	Lembaga Ketahanan Nasional	15105
52	Lembaga Sandi Negara	15102
53	Lembaga Administrasi Negara	15101
54	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	15103
55	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	15104
56	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa	15106
57	Arsip Nasional Republik Indonesia	15001
58	Perpustakaan Nasional RI	15003
59	Badan Pemeriksa Keuangan	14005
60	Badan Kepegawaian Negara	15002
61	Badan Pusat Statistik	15004
62	Badan Intelijen Negara	15008
63	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	15010
64	Badan Kependudukan dan KB Nasional	15009
65	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15013
66	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	15012
67	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan	15011
68	Badan Pertanahan Nasional	15014
69	Badan Tenaga Nuklir Nasional	15007

NO	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
70	Badan Standardisasi Nasional	15005
71	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	15006
72	Badan Pengawas Obat dan Makanan	15015
73	Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika	15016
74	Badan Narkotika Nasional	15017
75	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	15020
76	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	15018
77	Badan Koordinasi Keamanan Laut RI	15021
78	Badan SAR Nasional	15019
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	15023
80	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	15022
81	Badan Pengusahaan Kawasan Batam (Otorita Batam)	14220
82	Ombudsman Republik Indonesia	14008
83	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	15201
84	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI	14006
85	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	16006

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



[Handwritten Signature]
EKO SUTRISNO

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN
 PENYESUAIAN PENSUN POKOK PENSUNAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSUN
 ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI
 ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 18 TAHUN 2012

KODE INSTANSI DAERAH

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
1.	Pemerintah Provinsi NANGGROE ACEH DARUSSALAM	21100
2.	Pemerintah Kab. ACEH BESAR	21108
3.	Pemerintah Kab. PIDIE	21109
4.	Pemerintah Kab. ACEH UTARA	21111
5.	Pemerintah Kab. ACEH TIMUR	21105
6.	Pemerintah Kab. ACEH SELATAN	21103
7.	Pemerintah Kab. ACEH BARAT	21107
8.	Pemerintah Kab. ACEH TENGAH	21106
9.	Pemerintah Kab. ACEH TENGGARA	21104
10.	Pemerintah Kab. SIMEULUE	21101
11.	Pemerintah Kab. BIREUEN	21110
12.	Pemerintah Kab. ACEH SINGKIL	21102
13.	Pemerintah Kab. ACEH BARAT DAYA	21112
14.	Pemerintah Kab. GAYO LUES	21113
15.	Pemerintah Kab. ACEH TAMIANG	21114
16.	Pemerintah Kab. NAGAN RAYA	21115
17.	Pemerintah Kab. ACEH JAYA	21116
18.	Pemerintah Kab. BENER MERIAH	21117
19.	Pemerintah Kab. PIDIE JAYA	21118
20.	Pemerintah Kota SABANG	21172
21.	Pemerintah Kota BANDA ACEH	21171
22.	Pemerintah Kota LANGSA	21173
23.	Pemerintah Kota LHOKSEUMAWE	21174
24.	Pemerintah Kota SUBULUSSALAM	21175
25.	Pemerintah Provinsi SUMATERA UTARA	21200
26.	Pemerintah Kab. DELI SERDANG	21212
27.	Pemerintah Kab. KARO	21211
28.	Pemerintah Kab. LANGKAT	21213
29.	Pemerintah Kab. TAPANULI TENGAH	21204
30.	Pemerintah Kab. SIMALUNGUN	21209
31.	Pemerintah Kab. LABUHANBATU	21207
32.	Pemerintah Kab. DAIRI	21210
33.	Pemerintah Kab. TAPANULI UTARA	21205
34.	Pemerintah Kab. TAPANULI SELATAN	21203
35.	Pemerintah Kab. ASAHAN	21208
36.	Pemerintah Kab. NIAS	21201

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
37.	Pemerintah Kab. TOBA SAMOSIR	21206
38.	Pemerintah Kab. MANDAILING NATAL	21202
39.	Pemerintah Kab. NIAS SELATAN	21214
40.	Pemerintah Kab. HUMBANG HASUNDUTAN	21215
41.	Pemerintah Kab. PAKPAK BHARAT	21216
42.	Pemerintah Kab. SAMOSIR	21217
43.	Pemerintah Kab. SERDANG BEDAGAI	21218
44.	Pemerintah Kab. PADANG LAWAS	21221
45.	Pemerintah Kab. PADANG LAWAS UTARA	21220
46.	Pemerintah Kab. BATUBARA	21219
47.	Pemerintah Kab. LABUHAN BATU SELATAN	21222
48.	Pemerintah Kab. LABUHAN BATU UTARA	21223
49.	Pemerintah Kab. NIAS BARAT	21225
50.	Pemerintah Kab. NIAS UTARA	21224
51.	Pemerintah Kota MEDAN	21275
52.	Pemerintah Kota TEBING TINGGI	21274
53.	Pemerintah Kota BINJAI	21276
54.	Pemerintah Kota PEMATANG SIANTAR	21273
55.	Pemerintah Kota TANJUNG BALAI	21272
56.	Pemerintah Kota SIBOLGA	21271
57.	Pemerintah Kota PADANGSIDIMPUAN	21277
58.	Pemerintah Kota GUNUNG SITOLI	21278
59.	Pemerintah Provinsi RIAU	21400
60.	Pemerintah Kab. KAMPAR	21406
61.	Pemerintah Kab. BENGKALIS	21408
62.	Pemerintah Kab. INDRAGIRI HULU	21402
63.	Pemerintah Kab. INDRAGIRI HILIR	21403
64.	Pemerintah Kab. PELALAWAN	21404
65.	Pemerintah Kab. ROKAN HULU	21407
66.	Pemerintah Kab. ROKAN HILIR	21409
67.	Pemerintah Kab. SIAK	21405
68.	Pemerintah Kab. KUANTAN SINGINGI	21401
69.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN MERANTI	21410
70.	Pemerintah Kota PEKANBARU	21471
71.	Pemerintah Kota DUMAI	21472
72.	Pemerintah Provinsi SUMATERA BARAT	21300
73.	Pemerintah Kab. AGAM	21307
74.	Pemerintah Kab. PASAMAN	21309
75.	Pemerintah Kab. LIMAPULUH KOTA	21308
76.	Pemerintah Kab. SOLOK	21303
77.	Pemerintah Kab. PADANG PARIAMAN	21306
78.	Pemerintah Kab. PESISIR SELATAN	21302
79.	Pemerintah Kab. TANAH DATAR	21305
80.	Pemerintah Kab. SIJUNJUNG	21304
81.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN MENTAWAI	21301
82.	Pemerintah Kab. SOLOK SELATAN	21310
83.	Pemerintah Kab. DHARMASRAYA	21311

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
84.	Pemerintah Kab. PASAMAN BARAT	21312
85.	Pemerintah Kota BUKITTINGGI	21375
86.	Pemerintah Kota PADANG PANJANG	21374
87.	Pemerintah Kota SAWAHLUNTO	21373
88.	Pemerintah Kota SOLOK	21372
89.	Pemerintah Kota PADANG	21371
90.	Pemerintah Kota PAYAKUMBUH	21376
91.	Pemerintah Kota PARIAMAN	21377
92.	Pemerintah Provinsi JAMBI	21500
93.	Pemerintah Kab. BATANG HARI	21504
94.	Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG BARAT	21507
95.	Pemerintah Kab. BUNGO	21509
96.	Pemerintah Kab. MERANGIN	21502
97.	Pemerintah Kab. KERINCI	21501
98.	Pemerintah Kab. SAROLANGUN	21503
99.	Pemerintah Kab. TEBO	21508
100.	Pemerintah Kab. MUARO JAMBI	21505
101.	Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR	21506
102.	Pemerintah Kota JAMBI	21571
103.	Pemerintah Kota SUNGAI PENUH	21572
104.	Pemerintah Provinsi SUMATERA SELATAN	21600
105.	Pemerintah Kab. MUSI BANYUASIN	21606
106.	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU	21601
107.	Pemerintah Kab. MUARA ENIM	21603
108.	Pemerintah Kab. LAHAT	21604
109.	Pemerintah Kab. MUSI RAWAS	21605
110.	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ILIR	21602
111.	Pemerintah Kab. BANYUASIN	21607
112.	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU TIMUR	21609
113.	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU SELATAN	21608
114.	Pemerintah Kab. OGAN ILIR	21610
115.	Pemerintah Kab. EMPAT LAWANG	21612
116.	Pemerintah Kota PALEMBANG	21671
117.	Pemerintah Kota PAGAR ALAM	21673
118.	Pemerintah Kota LUBUK LINGGAU	21674
119.	Pemerintah Kota PRABUMULIH	21672
120.	Pemerintah Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	21900
121.	Pemerintah Kab. BANGKA	21901
122.	Pemerintah Kab. BELITUNG	21902
123.	Pemerintah Kab. BANGKA BARAT	21903
124.	Pemerintah Kab. BANGKA TENGAH	21904
125.	Pemerintah Kab. BANGKA SELATAN	21905
126.	Pemerintah Kab. BELITUNG TIMUR	21906
127.	Pemerintah Kota PANGKAL PINANG	21971
128.	Pemerintah Provinsi BENGKULU	21700
129.	Pemerintah Kab. BENGKULU UTARA	21703
130.	Pemerintah Kab. BENGKULU SELATAN	21701

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
131.	Pemerintah Kab. REJANG LEBONG	21702
132.	Pemerintah Kab. KAUR	21704
133.	Pemerintah Kab. SELUMA	21705
134.	Pemerintah Kab. MUKO-MUKO	21706
135.	Pemerintah Kab. KEPAHANG	21708
136.	Pemerintah Kab. LEBONG	21707
137.	Pemerintah Kab. BENGKULU TENGAH	21709
138.	Pemerintah Kota BENGKULU	21771
139.	Pemerintah Provinsi LAMPUNG	21800
140.	Pemerintah Kab. LAMPUNG SELATAN	21803
141.	Pemerintah Kab. LAMPUNG TENGAH	21805
142.	Pemerintah Kab. LAMPUNG UTARA	21806
143.	Pemerintah Kab. LAMPUNG BARAT	21801
144.	Pemerintah Kab. TULANG BAWANG	21808
145.	Pemerintah Kab. TANGGAMUS	21802
146.	Pemerintah Kab. WAY KANAN	21807
147.	Pemerintah Kab. LAMPUNG TIMUR	21804
148.	Pemerintah Kab. PESAWARAN	21809
149.	Pemerintah Kab. TULANG BAWANG BARAT	21812
150.	Pemerintah Kab. PRINGSEWU	21811
151.	Pemerintah Kab. MESUJI	21810
152.	Pemerintah Kota METRO	21872
153.	Pemerintah Kota BANDAR LAMPUNG	21871
154.	Pemerintah Provinsi DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	23100
155.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN SERIBU	
156.	Pemerintah Provinsi JAWA BARAT	23200
157.	Pemerintah Kab. BOGOR	23201
158.	Pemerintah Kab. SUKABUMI	23202
159.	Pemerintah Kab. CIANJUR	23203
160.	Pemerintah Kab. BEKASI	23216
161.	Pemerintah Kab. KARAWANG	23215
162.	Pemerintah Kab. PURWAKARTA	23214
163.	Pemerintah Kab. SUBANG	23213
164.	Pemerintah Kab. BANDUNG	23204
165.	Pemerintah Kab. SUMEDANG	23211
166.	Pemerintah Kab. GARUT	23205
167.	Pemerintah Kab. TASIKMALAYA	23206
168.	Pemerintah Kab. CIAMIS	23207
169.	Pemerintah Kab. CIREBON	23209
170.	Pemerintah Kab. KUNINGAN	23208
171.	Pemerintah Kab. INDRAMAYU	23212
172.	Pemerintah Kab. MAJALENGKA	23210
173.	Pemerintah Kab. BANDUNG BARAT	23217
174.	Pemerintah Kota BANDUNG	23273
175.	Pemerintah Kota BOGOR	23271
176.	Pemerintah Kota SUKABUMI	23272
177.	Pemerintah Kota CIREBON	23274

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
178.	Pemerintah Kota BEKASI	23275
179.	Pemerintah Kota DEPOK	23276
180.	Pemerintah Kota CIMAHI	23277
181.	Pemerintah Kota TASIKMALAYA	23278
182.	Pemerintah Kota BANJAR	23279
183.	Pemerintah Provinsi BANTEN	23600
184.	Pemerintah Kab. SERANG	23604
185.	Pemerintah Kab. PANDEGLANG	23601
186.	Pemerintah Kab. LEBAK	23602
187.	Pemerintah Kab. TANGERANG	23603
188.	Pemerintah Kota TANGERANG	23671
189.	Pemerintah Kota CILEGON	23672
190.	Pemerintah Kota SERANG	23673
191.	Pemerintah Kota TANGERANG SELATAN	23674
192.	Pemerintah Provinsi D.I. YOGYAKARTA	23400
193.	Pemerintah Kab. BANTUL	23402
194.	Pemerintah Kab. SLEMAN	23404
195.	Pemerintah Kab. GUNUNG KIDUL	23403
196.	Pemerintah Kab. KULON PROGO	23401
197.	Pemerintah Kota YOGYAKARTA	23471
198.	Pemerintah Provinsi JAWA TENGAH	23300
199.	Pemerintah Kab. SEMARANG	23322
200.	Pemerintah Kab. KENDAL	23324
201.	Pemerintah Kab. DEMAK	23321
202.	Pemerintah Kab. GROBOGAN	23315
203.	Pemerintah Kab. PEKALONGAN	23326
204.	Pemerintah Kab. BATANG	23325
205.	Pemerintah Kab. TEGAL	23328
206.	Pemerintah Kab. BREBES	23329
207.	Pemerintah Kab. PATI	23318
208.	Pemerintah Kab. KUDUS	23319
209.	Pemerintah Kab. PEMALANG	23327
210.	Pemerintah Kab. JEPARA	23320
211.	Pemerintah Kab. REMBANG	23317
212.	Pemerintah Kab. BLORA	23316
213.	Pemerintah Kab. BANYUMAS	23302
214.	Pemerintah Kab. CILACAP	23301
215.	Pemerintah Kab. PURBALINGGA	23303
216.	Pemerintah Kab. BANJARNEGARA	23304
217.	Pemerintah Kab. MAGELANG	23308
218.	Pemerintah Kab. TEMANGGUNG	23323
219.	Pemerintah Kab. WONOSOBO	23307
220.	Pemerintah Kab. PURWOREJO	23306
221.	Pemerintah Kab. KEBUMEN	23305
222.	Pemerintah Kab. KLATEN	23310
223.	Pemerintah Kab. BOYOLALI	23309
224.	Pemerintah Kab. SRAGEN	23314

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
225.	Pemerintah Kab. SUKOHARJO	23311
226.	Pemerintah Kab. KARANGANYAR	23313
227.	Pemerintah Kab. WONOGIRI	23312
228.	Pemerintah Kota SEMARANG	23374
229.	Pemerintah Kota SALATIGA	23373
230.	Pemerintah Kota PEKALONGAN	23375
231.	Pemerintah Kota TEGAL	23376
232.	Pemerintah Kota MAGELANG	23371
233.	Pemerintah Kota SURAKARTA	23372
234.	Pemerintah Provinsi JAWA TIMUR	23500
235.	Pemerintah Kab. GRESIK	23525
236.	Pemerintah Kab. MOJOKERTO	23516
237.	Pemerintah Kab. SIDOARJO	23515
238.	Pemerintah Kab. JOMBANG	23517
239.	Pemerintah Kab. SAMPANG	23527
240.	Pemerintah Kab. PAMEKASAN	23528
241.	Pemerintah Kab. SUMENEP	23529
242.	Pemerintah Kab. BANGKALAN	23526
243.	Pemerintah Kab. BONDOWOSO	23511
244.	Pemerintah Kab. SITUBONDO	23512
245.	Pemerintah Kab. BANYUWANGI	23510
246.	Pemerintah Kab. JEMBER	23509
247.	Pemerintah Kab. MALANG	23507
248.	Pemerintah Kab. PASURUAN	23514
249.	Pemerintah Kab. PROBOLINGGO	23513
250.	Pemerintah Kab. LUMAJANG	23508
251.	Pemerintah Kab. KEDIRI	23506
252.	Pemerintah Kab. TULUNGAGUNG	23504
253.	Pemerintah Kab. NGANJUK	23518
254.	Pemerintah Kab. TRENGGALEK	23503
255.	Pemerintah Kab. BLITAR	23505
256.	Pemerintah Kab. MADIUN	23519
257.	Pemerintah Kab. NGAWI	23521
258.	Pemerintah Kab. MAGETAN	23520
259.	Pemerintah Kab. PONOROGO	23502
260.	Pemerintah Kab. PACITAN	23501
261.	Pemerintah Kab. BOJONEGORO	23522
262.	Pemerintah Kab. TUBAN	23523
263.	Pemerintah Kab. LAMONGAN	23524
264.	Pemerintah Kota SURABAYA	23578
265.	Pemerintah Kota MOJOKERTO	23576
266.	Pemerintah Kota MALANG	23573
267.	Pemerintah Kota PASURUAN	23575
268.	Pemerintah Kota PROBOLINGGO	23574
269.	Pemerintah Kota BLITAR	23572
270.	Pemerintah Kota KEDIRI	23571
271.	Pemerintah Kota MADIUN	23577

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
272.	Pemerintah Kota BATU	23579
273.	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN BARAT	26100
274.	Pemerintah Kab. SAMBAS	26101
275.	Pemerintah Kab. SANGGAU	26105
276.	Pemerintah Kab. SINTANG	26107
277.	Pemerintah Kab. PONTIANAK	26104
278.	Pemerintah Kab. KAPUAS HULU	26108
279.	Pemerintah Kab. KETAPANG	26106
280.	Pemerintah Kab. BENGKAYANG	26102
281.	Pemerintah Kab. LANDAK	26103
282.	Pemerintah Kab. MELAWI	26110
283.	Pemerintah Kab. SEKADAU	26109
284.	Pemerintah Kab. KUBU RAYA	26112
285.	Pemerintah Kab. KAYONG UTARA	26111
286.	Pemerintah Kota PONTIANAK	26171
287.	Pemerintah Kota SINGKAWANG	26172
288.	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TENGAH	26200
289.	Pemerintah Kab. KAPUAS	26203
290.	Pemerintah Kab. BARITO UTARA	26205
291.	Pemerintah Kab. BARITO SELATAN	26204
292.	Pemerintah Kab. KOTAWARINGIN TIMUR	26202
293.	Pemerintah Kab. KOTAWARINGIN BARAT	26201
294.	Pemerintah Kab. PULANG PISAU	26210
295.	Pemerintah Kab. GUNUNG MAS	26211
296.	Pemerintah Kab. LAMANDAU	26207
297.	Pemerintah Kab. SUKAMARA	26206
298.	Pemerintah Kab. MURUNG RAYA	26213
299.	Pemerintah Kab. KATINGAN	26209
300.	Pemerintah Kab. SERUYAN	26208
301.	Pemerintah Kab. BARITO TIMUR	26212
302.	Pemerintah Kota PALANGKARAYA	26271
303.	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN SELATAN	26300
304.	Pemerintah Kab. BANJAR	26303
305.	Pemerintah Kab. TANAH LAUT	26301
306.	Pemerintah Kab. TAPIN	26305
307.	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI SELATAN	26306
308.	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI TENGAH	26307
309.	Pemerintah Kab. BARITO KUALA	26304
310.	Pemerintah Kab. TABALONG	26309
311.	Pemerintah Kab. KOTABARU	26302
312.	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI UTARA	26308
313.	Pemerintah Kab. TANAH BUMBU	26310
314.	Pemerintah Kab. BALANGAN	26311
315.	Pemerintah Kota BANJARMASIN	26371
316.	Pemerintah Kota BANJAR BARU	26372
317.	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TIMUR	26400
318.	Pemerintah Kab. KUTAI KARTANEGARA	26403

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
319.	Pemerintah Kab. PASER	26401
320.	Pemerintah Kab. BULUNGAN	26407
321.	Pemerintah Kab. BERAU	26405
322.	Pemerintah Kab. MALINAU	26406
323.	Pemerintah Kab. NUNUKAN	26408
324.	Pemerintah Kab. KUTAI BARAT	26402
325.	Pemerintah Kab. KUTAI TIMUR	26404
326.	Pemerintah Kab. PENAJAM PASER UTARA	26409
327.	Pemerintah Kab. TANA TIDUNG	26410
328.	Pemerintah Kota SAMARINDA	26472
329.	Pemerintah Kota BALIKPAPAN	26471
330.	Pemerintah Kota BONTANG	26474
331.	Pemerintah Kota TARAKAN	26473
332.	Pemerintah Provinsi SULAWESI UTARA	27100
333.	Pemerintah Kab. MINAHASA	27102
334.	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW	27101
335.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN SANGIHE	27103
336.	Pemerintah Kab. MINAHASA SELATAN	27105
337.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN TALAUD	27104
338.	Pemerintah Kab. MINAHASA UTARA	27106
339.	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW UTARA	27107
340.	Pemerintah Kab. SIAU TAGULANDANG BIARO	27108
341.	Pemerintah Kab. MINAHASA TENGGARA	27109
342.	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	27110
343.	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	27111
344.	Pemerintah Kota MANADO	27171
345.	Pemerintah Kota BITUNG	27172
346.	Pemerintah Kota TOMOHON	27173
347.	Pemerintah Kota KOTAMOBAGU	27174
348.	Pemerintah Provinsi GORONTALO	27500
349.	Pemerintah Kab. GORONTALO	27502
350.	Pemerintah Kab. BOALEMO	27501
351.	Pemerintah Kab. POHUWATO	27503
352.	Pemerintah Kab. BONE BOLANGO	27504
353.	Pemerintah Kab. GORONTALO UTARA	27505
354.	Pemerintah Kota GORONTALO	27571
355.	Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGAH	27200
356.	Pemerintah Kab. POSO	27204
357.	Pemerintah Kab. DONGGALA	27205
358.	Pemerintah Kab. TOLI-TOLI	27206
359.	Pemerintah Kab. BANGGAI	27202
360.	Pemerintah Kab. BUOL	27207
361.	Pemerintah Kab. MOROWALI	27203
362.	Pemerintah Kab. BANGGAI KEPULAUAN	27201
363.	Pemerintah Kab. PARIGI MOUTONG	27208
364.	Pemerintah Kab. TOJO UNA-UNA	27209
365.	Pemerintah Kab. SIGI	27210

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
366.	Pemerintah Kota PALU	27271
367.	Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN	27300
368.	Pemerintah Kab. PINRANG	27315
369.	Pemerintah Kab. GOWA	27306
370.	Pemerintah Kab. WAJO	27313
371.	Pemerintah Kab. BONE	27311
372.	Pemerintah Kab. TANA TORAJA	27318
373.	Pemerintah Kab. MAROS	27308
374.	Pemerintah Kab. LUWU	27317
375.	Pemerintah Kab. SINJAI	27307
376.	Pemerintah Kab. BULUKUMBA	27302
377.	Pemerintah Kab. BANTAENG	27303
378.	Pemerintah Kab. JENEPONTO	27304
379.	Pemerintah Kab. SELAYAR	27301
380.	Pemerintah Kab. TAKALAR	27305
381.	Pemerintah Kab. BARRU	27310
382.	Pemerintah Kab. SIDENRENG RAPPANG	27314
383.	Pemerintah Kab. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	27309
384.	Pemerintah Kab. SOPPENG	27312
385.	Pemerintah Kab. ENREKANG	27316
386.	Pemerintah Kab. LUWU UTARA	27319
387.	Pemerintah Kab. LUWU TIMUR	27320
388.	Pemerintah Kab. TORAJA UTARA	27321
389.	Pemerintah Kota MAKASSAR	27371
390.	Pemerintah Kota PARE-PARE	27372
391.	Pemerintah Kota PALOPO	27373
392.	Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGGARA	27400
393.	Pemerintah Kab. KONAWE	27403
394.	Pemerintah Kab. BUTON	27401
395.	Pemerintah Kab. MUNA	27402
396.	Pemerintah Kab. KOLAKA	27404
397.	Pemerintah Kab. KONAWE SELATAN	27405
398.	Pemerintah Kab. KOLAKA UTARA	27408
399.	Pemerintah Kab. BOMBANA	27406
400.	Pemerintah Kab. WAKATOBI	27407
401.	Pemerintah Kab. BUTON UTARA	27409
402.	Pemerintah Kab. KONAWE UTARA	27410
403.	Pemerintah Kota KENDARI	27471
404.	Pemerintah Kota BAUBAU	27472
405.	Pemerintah Provinsi BALI	25100
406.	Pemerintah Kab. BULELENG	25108
407.	Pemerintah Kab. JEMBRANA	25101
408.	Pemerintah Kab. KLUNGKUNG	25105
409.	Pemerintah Kab. GIANYAR	25104
410.	Pemerintah Kab. KARANGASEM	25107
411.	Pemerintah Kab. BANGLI	25106
412.	Pemerintah Kab. BADUNG	25103

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
413.	Pemerintah Kab. TABANAN	25102
414.	Pemerintah Kota DENPASAR	25171
415.	Pemerintah Provinsi NUSA TENGGARA BARAT	25200
416.	Pemerintah Kab. LOMBOK BARAT	25201
417.	Pemerintah Kab. LOMBOK TENGAH	25202
418.	Pemerintah Kab. LOMBOK TIMUR	25203
419.	Pemerintah Kab. BIMA	25206
420.	Pemerintah Kab. SUMBAWA	25204
421.	Pemerintah Kab. DOMPU	25205
422.	Pemerintah Kab. SUMBAWA BARAT	25207
423.	Pemerintah Kab. LOMBOK UTARA	25208
424.	Pemerintah Kota MATARAM	25271
425.	Pemerintah Kota BIMA	25272
426.	Pemerintah Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR	25300
427.	Pemerintah Kab. KUPANG	25303
428.	Pemerintah Kab. BELU	25306
429.	Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH UTARA	25305
430.	Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH SELATAN	25304
431.	Pemerintah Kab. ALOR	25307
432.	Pemerintah Kab. SIKKA	25310
433.	Pemerintah Kab. FLORES TIMUR	25309
434.	Pemerintah Kab. ENDE	25311
435.	Pemerintah Kab. NGADA	25312
436.	Pemerintah Kab. MANGGARAI	25313
437.	Pemerintah Kab. SUMBA TIMUR	25302
438.	Pemerintah Kab. SUMBA BARAT	25301
439.	Pemerintah Kab. LEMBATA	25308
440.	Pemerintah Kab. ROTE NDAO	25314
441.	Pemerintah Kab. MANGGARAI BARAT	25315
442.	Pemerintah Kab. MANGGARAI TIMUR	25319
443.	Pemerintah Kab. SUMBA BARAT DAYA	25317
444.	Pemerintah Kab. NAGEKEO	25318
445.	Pemerintah Kab. SUMBA TENGAH	25316
446.	Pemerintah Kab. SABU RAIJUA	25320
447.	Pemerintah Kota KUPANG	25371
448.	Pemerintah Provinsi MALUKU	28100
449.	Pemerintah Kab. MALUKU TENGAH	28103
450.	Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA	28102
451.	Pemerintah Kab. BURU	28104
452.	Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA BARAT	28101
453.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN ARU	28105
454.	Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN BARAT	28106
455.	Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN TIMUR	28107
456.	Pemerintah Kab. BURU SELATAN	28108
457.	Pemerintah Kab. MALUKU BARAT DAYA	28109
458.	Pemerintah Kota AMBON	28171
459.	Pemerintah Kota TUAL	28172

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
460.	Pemerintah Provinsi MALUKU UTARA	28200
461.	Pemerintah Kab. HALMAHERA BARAT	28201
462.	Pemerintah Kab. HALMAHERA TENGAH	28202
463.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN SULA	28203
464.	Pemerintah Kab. HALMAHERA SELATAN	28204
465.	Pemerintah Kab. HALMAHERA UTARA	28205
466.	Pemerintah Kab. HALMAHERA TIMUR	28206
467.	Pemerintah Kab. PULAU MOROTAI	28207
468.	Pemerintah Kota TERNATE	28271
469.	Pemerintah Kota TIDORE KEPULAUAN	28272
470.	Pemerintah Provinsi PAPUA	29400
471.	Pemerintah Kab. JAYAPURA	29403
472.	Pemerintah Kab. BIAK NUMFOR	29406
473.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN YAPEN	29405
474.	Pemerintah Kab. MERAUKE	29401
475.	Pemerintah Kab. JAYAWIJAYA	29402
476.	Pemerintah Kab. NABIRE	29404
477.	Pemerintah Kab. PUNCAK JAYA	29408
478.	Pemerintah Kab. PANIAI	29407
479.	Pemerintah Kab. MIMIKA	29409
480.	Pemerintah Kab. BOVEN DIGOEL	29410
481.	Pemerintah Kab. MAPPI	29411
482.	Pemerintah Kab. ASMAT	29412
483.	Pemerintah Kab. YAHUKIMO	29413
484.	Pemerintah Kab. PEGUNUNGAN BINTANG	29414
485.	Pemerintah Kab. TOLIKARA	29415
486.	Pemerintah Kab. SARMI	29416
487.	Pemerintah Kab. KEEROM	29417
488.	Pemerintah Kab. WAROPEN	29418
489.	Pemerintah Kab. SUPIORI	29419
490.	Pemerintah Kab. MAMBERAMO RAYA	29420
491.	Pemerintah Kab. MAMBERAMO TENGAH	29421
492.	Pemerintah Kab. LANI JAYA	29422
493.	Pemerintah Kab. YALIMO	29423
494.	Pemerintah Kab. NDUGA	29424
495.	Pemerintah Kab. DOGIYAI	29425
496.	Pemerintah Kab. PUNCAK	29428
497.	Pemerintah Kab. DEIYAI	29426
498.	Pemerintah Kab. INTAN JAYA	29427
499.	Pemerintah Kota JAYAPURA	29471
500.	Pemerintah Provinsi KEPULAUAN RIAU	22100
501.	Pemerintah Kab. BINTAN	22102
502.	Pemerintah Kab. KARIMUN	22101
503.	Pemerintah Kab. NATUNA	22103
504.	Pemerintah Kab. LINGGA	22104
505.	Pemerintah Kab. KEPULAUAN ANAMBAS	22105
506.	Pemerintah Kota BATAM	22171

NO.	NAMA INSTANSI	KODE
1	2	3
507.	Pemerintah Kota TANJUNGPINANG	22172
508.	Pemerintah Provinsi PAPUA BARAT	29100
509.	Pemerintah Kab. SORONG	29107
510.	Pemerintah Kab. SORONG SELATAN	29106
511.	Pemerintah Kab. RAJA AMPAT	29108
512.	Pemerintah Kab. MANOKWARI	29105
513.	Pemerintah Kab. TELUK BINTUNI	29104
514.	Pemerintah Kab. TELUK WONDAMA	29103
515.	Pemerintah Kab. FAK-FAK	29101
516.	Pemerintah Kab. KAIMANA	29102
517.	Pemerintah Kab. TAMBRAUW	29110
518.	Pemerintah Kab. MAYBRAT	29109
519.	Pemerintah Kota SORONG	29171
520.	Pemerintah Provinsi SULAWESI BARAT	27600
521.	Pemerintah Kab. MAMUJU UTARA	27605
522.	Pemerintah Kab. MAMUJU	27604
523.	Pemerintah Kab. MAMASA	27603
524.	Pemerintah Kab. POLEWALI MANDAR	27602
525.	Pemerintah Kab. MAJENE	27601

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

SUTRISNO